



AKTIVITAS PENGENDALIAN PADA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH

Endah Labdhameirina¹, Andi Kusumawati², Nirwana³

Universitas Hasanuddin

e.labdhameirina@gmail.com, andiuma88@gmail.com, nirwana@fe.unhas.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 10 Juni 2022

Disetujui : 20 Juni 2023

Dipublikasikan : 25 Juli 2023

ABSTRAK

Kata Kunci :
Kompetensi auditor,
Independensi auditor, Audit berbasis risiko,
Kualitas audit

Barang Milik Negara (BMN) yang belum maksimal dapat dilihat pada pendapat lembaga pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan BMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penatausahaan BMN pada BPPW D.I. Yogyakarta, serta untuk mengetahui aktivitas pengendalian penatausahaan BMN berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa studi kasus. Informan dari objek penelitian merupakan sumber utama yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan BMN BPPW D.I. Yogyakarta melalui proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dimana masih terdapat kesalahan pada pembukuan dan belum maksimalnya dalam inventarisasi BMN. Kemudian aktivitas pengendalian pada penatausahaan BMN sudah dilakukan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu dengan terpenuhinya sebelas unsur aktivitas pengendalian.

ABSTRACT

Keywords :
Auditor competence,
Auditor independence,
Risk-based audit,
Audit quality

State Property (BMN) that has not been maximised can be seen in the opinion of the financial auditing agency on the central government's financial statements, which are almost every year still dominated by BMN management problems. This study aims to determine the administration of BMN at BPPW D.I. Yogyakarta and the control activities of the BMN administration based on the government's Internal Control System. This research uses a qualitative descriptive method in the form of a case study. Informants from the object of research are the main sources needed to obtain information related to research. The results showed that the administration of BMN BPPW D.I. Yogyakarta went through the processes of bookkeeping, inventory, and reporting. Where there are still errors in bookkeeping and not yet optimal BMN inventory. Then the control activities in BMN administration have been carried out in accordance with the government's Internal Control System, namely by fulfilling the eleven elements of control activities.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan good governance, salah satu yang telah dibuat pemerintah yaitu kebijakan tentang Barang Milik Negara (BMN). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa

Barang Milik Negara (BMN) yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehannya lainnya yang sah. Selain itu, pengertian barang menurut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Barang Milik Negara (BMN) yang belum maksimal dapat dilihat pada pendapat lembaga pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan BMN (Agustina 2021). Untuk itu pada lembaga pemerintahan perlu ditetapkan penatausahaan yang baik agar dapat diketahui keberadaan serta jumlah yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Penatausahaan BMN menurut PMK Nomor 181/PMK.06/2016 adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penatausahaan BMN dapat digunakan sebagai penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun untuk bahan penyusunan rencana anggaran, pengamanan administrasi BMN (Mbanta, 2014).

Masih adanya permasalahan pengelolaan BMN dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan adanya temuan-temuan dan upaya melakukan percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK dari tahun 2005 hingga 2021 diantaranya temuan-temuan tentang kelebihan pembayaran dan sanksi, pengelolaan dan penatausahaan persediaan dan aset khususnya pengelolaan persediaan, hibah barang milik negara (BMN) diserahkan ke masyarakat dan pengaman aset. Berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2020 atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 terkait pemindahtanganan yaitu "Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) untuk Diserahkan kepada Masyarakat Kurang Memadai". Hal ini juga merupakan permasalahan yang dihadapi Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dalam hal pengelolaan BMN.

Peran instansi pemerintah dapat dikatakan baik dapat dilihat dari segi pengendalian internnya, dan berbagai penyimpangan terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tentang Penatausahaan BMN dibutuhkan adanya peraturan perundangan-undangan untuk menghindari penyimpangan tersebut (Vianthy Pulakiang et al. 2021). Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring atas pengelolaan aset negara harus dibangun secara memadai. Lingkungan pengendalian yang kondusif, setiap instansi pemerintah perlu melakukan penilaian risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengatur aktivitas pengendalian mencakup proses reviu kinerja atas pengelolaan aset negara, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya serta dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting. Berdasarkan pra observasi yang didapat pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta masih terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan BMN terutama pada proses

penatausahaan BMN diantaranya kesalahan pembukuan karena adanya koreksi akun pada persediaan, koreksi kode barang dan koreksi kode barang (reklasifikasi dari aset), kemudian adanya pembaharuan aplikasi dari Kementerian Keuangan, dan masih adanya BMN yang belum diusulkan serah terima karena tidak dapat ditelusuri keberadaannya fisik dan dokumennya dan BMN yang masih belum dilakukan penghapusan. Beberapa permasalahan tersebut dapat menimbulkan temuan yang berulang oleh BPK dan juga dapat berpotensi menimbulkan tidak kesesuaian dalam pelaporan jika terus menerus dilakukan tanpa adanya pengendalian intern.

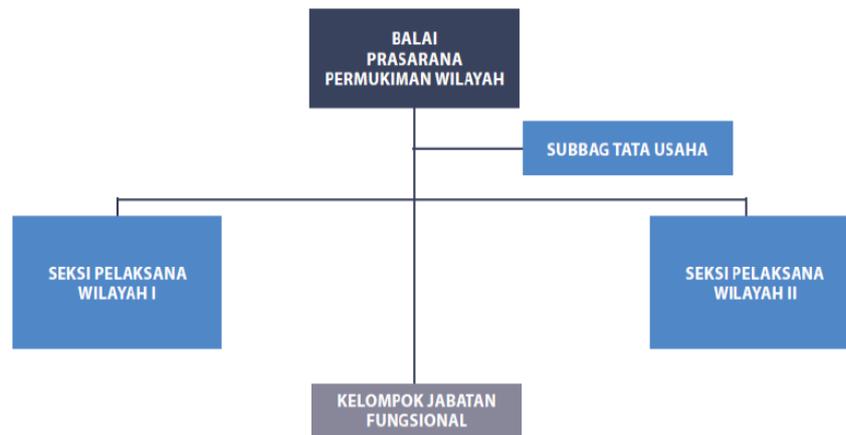
METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa studi kasus dengan maksud untuk mendiskripsikan dan menggambarkan aktivitas pengendalian dan penatausahaan Barang Milik Negara yang ada pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan pengamatan langsung objek yang diteliti, dalam hal ini mengamati langsung pelaksanaan pengelolaan aset BMN khususnya penatausahaan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan pihak instansi terkait. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada Pejabat dan Pegawai untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana aktivitas pengendalian dan penatausahaan BMN. Kemudian untuk dokumentasi diperoleh dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang berupa laporan serta keteramngan yang dapat mendukung penelitian. Sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, dianalisis kemudian dievaluasi. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yang mengacu pada konsep (Milles dan Huberman, 1992) yaitu mengacu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam beberapa langkah; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penatausahaan Barang Milik Negara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) D.I. Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana dan fasilitasi serah terima aset. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPPW D.I. Yogyakarta didukung oleh beberapa bagian seperti yang tergambar dalam struktur organisasi yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 terdiri dari:



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Balai PPW D.I. Yogyakarta

Sumber : Permen PUPR No. 16 Tahun 2020

BPPW D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan penatausahaan BMN ditinjau dari dokumen dan catatan yang ada. Penatausahaan BMN BPPW D.I. Yogyakarta melalui proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Dalam proses penatausahaan BPPW D.I. Yogyakarta sejak tahun 2022 sudah memakai sistem baru yaitu Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI).

a. Pembukuan

1) Pendaftaran

Dalam melakukan pendaftaran dilakukan kedalam daftar barang terlebih dahulu menurut penggolongan dan kodefikasi berdasarkan dokumen sumber seperti Berita Acara Serah Terima, Faktur Barang dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). BPPW D.I. Yogyakarta melakukan proses pendaftaran atas dokumen pada setiap transaksi dan mendaftarkan data transaksi BMN kedalam buku barang kuasa pengguna Intrakopmtabel, buku barang kuasa pengguna Ekstrakopmtabel, buku barang kuasa pengguna bersejarah, buku kuasa pengguna barang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pada BPPW D.I. Yogyakarta tidak mendaftarkan buku barang kuasa pengguna barang bersejarah dan masih terdapat kesalahan dalam penggolongan dan kodefikasi barang karena kurangnya koordinasi dan pemahaman operator dengan adanya peralihan sistem baru yaitu SAKTI.

2) Pencatatan

Dalam mencatat semua BMN kedalam buku barang, Kartu Identitas Barang, daftar barang ruangan. Kemudian setiap data transaksi BMN kedalam buku barang kuasa pengguna intrakomptabel dan buku barang kuasa pengguna Ekstrakomptabe; berdasarkan dokumen sumber. BPPW D.I. Yogyakarta dalam proses pencatatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan menurut PMK 181/PMK.06/2016 dengan diakuinya saldo akhir laporan barang kuasa pengguna tahunan.

3) Kodefikasi

BMN digolongkan dan dibuat kodefikasi berupa pemberian kode pada setiap BMN, terdapat kode lokasi/kode UAKPB sesuai yang diatur dalam PMK

Nomor 29 Tahun 2010. BPPW D.I. Yogyakarta telah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut kesalahan dalam pembukuan BPPW D.I. Yogyakarta:

Tabel 1 Koreksi Akun Persediaan

| No | Nilai Pembelian | Kode Akun | Kode Akun Setelah Koreksi | Keterangan |
|----|-----------------|-----------|---------------------------|---|
| 1 | Rp 2.810.000 | 521211 | 521811 | Pembelian Komputer Supplies PPK PKP |
| 2 | Rp 2.663.500 | 521211 | 521811 | Pembelian ATK PPK PKP |
| 3 | Rp 3.545.000 | 521211 | 521811 | Pembelian ATK PPK Air Minum |
| 4 | Rp 3.530.000 | 521211 | 521811 | Pembelian Komputer Supplies PPK Air Minum |

Sumber: Data internal BPPW D.I. Yogyakarta 14 Maret 2023

Tabel 2 Koreksi Kode Barang

| No | Nilai Pembelian | Kode Barang | Kode Barang Setelah Koreksi | Keterangan |
|----|-----------------|------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Rp 5.945.000 | 1010701001000001 | 1010901003000024 | Pembelian Snack dan Makan Kegiatan UNU |
| 2 | Rp 74.541.800 | 1010901001000005 | 1010901001000022 | Pembelian ATK PPK PSII Kegiatan UNU |

Sumber: Data internal BPPW D.I. Yogyakarta 14 Maret 2023

Tabel 3 Koreksi Kode Barang (Reklasifikasi dari Aset)

| No | Nilai Pembelian | Kode Barang | Kode Barang Setelah Koreksi | Keterangan |
|----|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Rp 100.000 | 6010201003 | 1010301003000002 | Pembelian ATK PPK Air Minum |

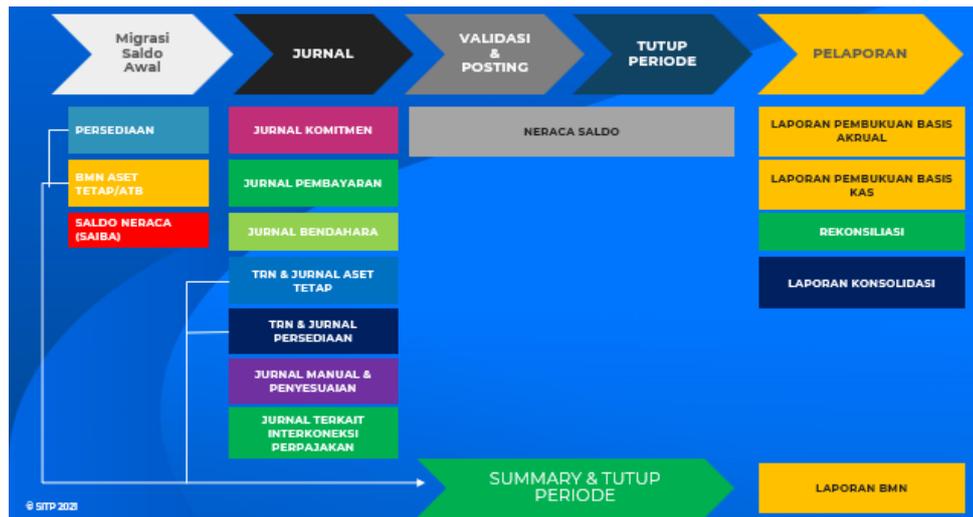
Sumber: Data internal BPPW D.I. Yogyakarta 14 Maret 2023

b. Inventarisasi

BPPW D.I. Yogyakarta melaksanakan inventarisasi terhadap BMN berupa persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan cara opname fisik sekurang-kurangnya dalam 1 tahun dengan membentuk tim opname fisik kemudian dilakukan opname dengan memisahkan barang berdasarkan kondisi barang seperti baik, barang rusak ringan dan barang rusak berat. Untuk inventarisasi selain persediaan melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun. BPPW D.I. Yogyakarta dalam sensus sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun belum dilakukan dengan maksimal.

c. Pelaporan

BPPW D.I. Yogyakarta melakukan rangkaian kegiatan menyusun dan menyampaikan data dan informasi. BPPW D.I. Yogyakarta sebagai UAKPB menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP semesteran dan tahunan). Proses Penyusunan Laporan BMN melalui komputerisasi aplikasi SAKTI dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2 Proses Penyusunan Laporan BMN

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu 2021

Aktivitas Pengendalian Penatausahaan BMN

BPPW D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif yaitu melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai yang diamantkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 18 bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini pada Balai PPW D.I. Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengendalian atas penatausahaan BMN yang tergambar dalam sub unsur kegiatan pengendalian berikut:

- a. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
 BPPW D.I. Yogyakarta telah melakukan perencanaan aset serta proses reviu terhadap realisasi pengadaan aset dengan baik.
- b. Pembinaan sumber daya manusia
 Dalam hal ini di BPPW D.I. Yogyakarta telah melakukan uraian jabatan petugas penatausahaan barang serta pelatihan dan pendidikan tentang pengelolaan BMN.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 Adanya pembatasan akses log-in aplikasi melalui password, pencegahan virus dan spyware, pengecekan ulang data serta adanya proses *back up* data.
- d. Pengendalian fisik atas aset
 Adanya *guarantee letter* dalam setiap pengadaan aset, ruang penyimpanan aset, pembatasan akses ruang penyimpanan, serta pengamanan fasilitas.
- e. Penetapan reviu indikator dan ukuran kinerja
 Penetapan reviu dan indikator dilakukannya melalui target realisasi keuangan serta jumlah unit aset yang terealisasi dibandingkan dengan rencana.
- f. Pemisahan fungsi
 Sudah dilakukannya pemisahan antara tugas penyimpanan dari petugas pencatatan.
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting
 Pada BPPW D.I. Yogyakarta telah melakukan prosedur permintaan penggunaan aset tetap sehingga menggambarkan bahwa dalam setiap pengeluaran aset tetap sudah ada prosedur yang harus dilengkapi.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu

BPPW D.I. Yogyakarta melakukan pencatatan dan membuat kode barang yang digunakan sebagai pengelompokkan barang.

- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
BPPW D.I. Yogyakarta menugaskan pegawai tertentu untuk menangani pencatatan dan penyimpanan BMN.
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
Dilakukannya stok opname untuk melihat akuntabilitas antara pencatatan dan kondisi fisik yang ada.
- k. Dokumentasi yang baik atas pengendalian intern dan transaksi/ kejadian penting
BPPW D.I. Yogyakarta mempunyai ruang penyimpanan dan menghimbau kepada pegawai untuk mengarsipkan dokumen sumber.

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan menyelenggarakan aktivitas pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya. BPPW D.I. Yogyakarta dapat melakukan evaluasi aktivitas pengendalian secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan BPPW D.I. Yogyakarta melalui proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal pembukuan masih adanya kesalahan dikarenakan kurangnya koordinasi dan pemahaman operator dengan adanya sistem SAKTI. Kemudian dalam inventarisasi BMN masih kurang maksimal karena belum dilakukan updating data/barang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Aktivitas pengendalian pada penatausahaan BMN BPPW D.I. Yogyakarta, secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu dengan terpenuhinya sebelas sub unsur kegiatan pengendalian yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Enny. 2021. "Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance." *Solusi* 19(1):105–17.
- Anon. n.d. "Pengaruh Unsur SPIP Terhadap Penatausahaan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat) The Influence of SPIP Element on The Administration of Fixed Assets (Case Study on West Bandung Regency Government) Wilhelmus Freksi Kurniadi Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi) Khozin Arief Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi) Yanti Rufaedah Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)."
- Artedi Candra. 2022. Pengaruh SPIP dan Software Aplikasi SIMDA BMD terhadap Kualitas Penatausahaan Aset Tetap (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung. 152-163. 2(2). ISSN 2747-1241
- Fauzan, Alya Dhiya, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, and Hastuti Jurusan Akuntansi. 2021. "Pengaruh Implementasi SPIP Terhadap Penatausahaan Aset Tetap Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD Di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat) The Effect of SPIP Implementation on the Administration of Fixed Assets and Its Implication to The Quality of Financial Reports (Survey on SKPD in West Bandung Regency Government) Iyeh

- Supriatna.” Indonesian Accounting Research Journal 1(3):528–35.
- Meilasari, Sudrajat Martadinata. 2020. “Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun ANggaran 2017-2019.” *Journal of Accounting, Finance and Auditing* 2(2):1525.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 27 Edisi revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mbanta, Zarjani. 2014. *Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Guna*. Vol.4 No1. 120.
- Mulyadi (2017) *Sistem Akuntansi*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat
- Murwaningsing, Ety. 2009. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilies dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 11 No. 1. 30-41.
- Novika. 2021. “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Bangka Belitung Novika.” *Jurnal IAKP* 2(1).
- Nurcahya Avianty, Ditha, Andy Hidayat Jatmika, Lalu Miftahul Ulum, and Uptb Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok. 2020. *SISTEM Informasi Manajemen Aset Pada Bpkad Provinsi Nusa Tenggara Barat Berbasis Website Dengan Framework Laravel (Asset Management Information System In Bpkad Province Of West Nusa Tenggara Based On Laravel Framework)*.
- Nursafitri, Riski Eka, and Sari Andayani. 2021. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Daerah.” *Maneksi* 177–85.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Noomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Thun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- Peraturan menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi san tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR.
- PUPR (2022) Tentang Meningkatkan Dari Tahun Sebelumnya, Kementerian PUPR Selesaikan Tindaklanjut Rekomendasi BPK RI Sebesar 66,6% Pada Semester I 2022. <https://www.pu.go.id/Berita/Meningkat-Dari-Tahun-Sebelumnya-Kementerian-Pupr-Selesaikan-Tindaklanjut-Rekomendasi-Bpk-Ri-Sebesar-666->

Pada-Semester-I-2022

- Rizkia Daulany, and Anthony Hardinal Sijahat. 2021. "Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Bmn Rizkia 2021." APIC 2:1-17.
- Setiadi, Ivan, Anhulaila M. Palampanga, and Nina Yusnita. 2018. Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (Bmn) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Salla, Azmil Bin. 2016. Pengaruh Mekanisme GCG Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.
- Sudrajat, Ajat dan Arles Parulian Ompusunggu. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Vol. 2 No. 2. 2015.
- Sekretariat Kabinet RI (2022) Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Aset Barang Milik Negara Di Lingkungan Pemerintah. <https://Setkab.Go.Id/Pemantauan-Dan-Evaluasi-Terhadap-Pengelolaan-Aset-Barang-Milik-Negara-Di-Lingkungan-Pemerintah/>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Vebrianto, Avib. 2016. Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang/Aset Negara Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala.
- Viyanthi Pulakiang, Judhystira, Ventje Ilat, Heince RN Wokas, Jurusan Akuntansi, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. 2021. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Evaluation of the Internal Control System for the Administration of State Property at the Office of Financial Supervision and Development Representative of the Province of North Sulawesi. Vol. 5.
- Wibowo, Sujatmiko. 2018. "Evaluasi Atas Pengendalian Intern Penatausahaan Barang Milik Negara Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Kasus Pada Inspektorat Jenderal Depdiknas)." Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi 4(2):151-70.
- Wilhelmus Frekti Kurniadi, Khozin Arief, Yanti Rufaedah. 2021. Pengaruh Unsir SPIP terhadap Penatausahaan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). 211-223 1(2). ISSN 2747-1241